



Setia pada Kebenaran

SUMBANGAN FILSAFAT SEBAGAI ILMU KRITIS

Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar Ilmu Filsafat

Prof. Dr. J. Sudarminta, S.J.

Disampaikan pada Sidang Terbuka
Senat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
di Jakarta, 12 Mei 2007

DAFTAR ISI

Pengantar	3
1. Pengertian dan Pentingnya Kebenaran	7
a. Pengertian	7
b. Pentingnya Kebenaran	12
2. Filsafat sebagai Ilmu Kritis dan Kesetiaan pada Kebenaran	22
a. Pengertian Filsafat Sebagai Ilmu Kritis	22
b. Sumbangan Filsafat sebagai Ilmu Kritis untuk Setia pada Kebenaran	32
3. Mendidik untuk Tetap Setia pada Kebenaran	55
Rangkuman	64
Ucapan Terima Kasih	66
Riwayat Hidup	78

SETIA PADA KEBENARAN

SUMBANGAN FILSAFAT SEBAGAI ILMU KRITIS

Pengantar

Salah satu pertanyaan peserta yang diajukan dalam seminar memperingati Dies Natalis STF Driyarkara ke-38, 25 Februari 2007 yang lalu, adalah: "Bagaimana dalam pendidikan, kita dapat membantu peserta didik untuk tetap setia pada kebenaran?" Pertanyaan ini diajukan dalam rangka menanggapi pembicaraan Prof. Dr. A. Sja'fii Ma'arif yang berjudul "Ketika Laku dan Kata Tidak Lagi Bersahabat: Indonesia Diancam Krisis Kepribadian." Rupanya bukan hanya dalam ranah kehidupan pribadi, tetapi juga dalam ranah kehidupan publik, dewasa ini satunya kata dan perbuatan semakin sulit ditemukan. Dusta ada di mana-mana. Bukan hanya para petualang cinta yang bermulut buaya. Mengumbar janji dan tidak pernah ditepati. Dalam kehidupan publik dewasa ini pun, yang amat dikuasai oleh budaya pasar, bualan adalah bagian tidak terpisahkan dari jualan. Banyak iklan di media massa menyebarkan kebohongan publik. Coba dengarkan saja iklan-iklan di radio yang menawarkan rumah hunian: selalu nyaman, aman dan tenteram bagaikan hidup di taman firdaus. Bebas banjir bebas kemacetan. Tetapi ada juga yang menganggap

iklan seperti itu sudah semestinya. Bukankah untuk dapat dijual di pasar global, yang penting kemasan menarik bagi publik calon pembeli? Perkara isi atau substansi yang ditawarkan, itu perkara belakangan. Tujuan utama iklan bukanlah memberi informasi yang benar, tetapi memikat sebanyak mungkin pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Payahnya, bukan hanya produk berupa barang dagangan, tetapi juga produk jasa layanan di bidang pendidikan maupun kesehatan pun tidak lepas dari bujuk rayu yang menyesatkan pelanggan.

Dunia politik, baik pada lingkup internasional maupun nasional, juga tidak lepas dari kebohongan publik. Pada lingkup internasional misalnya, cukup umum diketahui bahwa baik kampanye perang melawan Amerika Serikat yang diserukan Osama bin Laden maupun kampanye presiden George W. Bush melawan jaringan teroris Al-Qaeda yang membawa ke penyerbuan terhadap rezim Taliban di Afghanistan dan kemudian agresi Amerika ke Irak untuk merontokkan pemerintahan Saddam Husein, mengandung banyak kebohongan publik. Pada lingkup perpolitikan nasional, kebohongan publik banyak dilakukan terkait dengan banyak kasus kerusuhan dan pembunuhan massal, pembunuhan dan penculikan aktivis, serta kasus-kasus korupsi yang tidak kunjung henti. Kecenderungan menolak kebenaran juga nampak dari keengganan mengakui kenyataan bahwa di beberapa wilayah negeri kita ini memang ada yang menderita busung lapar dan kekurangan gizi. Agar lebih enak di telinga sebut saja gejala rawan pangan, tetapi kenyataannya "sami mawon".

Cukup banyak janji para politisi juga tetap tinggal janji. Artinya, tidak pernah ditepati. Masa kampanye menjelang pemilu adalah masa menebar pesona dan memikat hati rakyat guna menggalang perolehan suara sebanyak-banyaknya. Setelah suara diperoleh dan ke-

kuasaan diraih, apa yang sebelumnya dijanjikan dengan mudah dilupakan. Maka tidak mengherankan bahwa rakyat kemudian merasa dibohongi. Para politisi yang menyebut diri sebagai wakil rakyat dalam kenyataan tidak mewakili kepentingan rakyat banyak yang menjadi konstituennya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan partai dan dirinya sendiri. Rakyat juga menunggu pemenuhan janji mereka yang memegang tampuk kepemimpinan pemerintah. Janji-janji, entah sifatnya ganti rugi atau bantuan akibat bencana, cepat diucapkan, tetapi pelaksanaannya selalu "tunggu dulu."

Dunia ekonomi dan politik memang sering dianggap kotor, sehingga kenyataan banyaknya kebohongan di dalamnya sering dianggap lumrah. Tetapi dalam kehidupan beragama pun, baik para pemuka agama maupun mereka yang termasuk umat beragama, tidak dapat mengklaim diri imun terhadap dosa kebohongan publik. Kepalsuan dan kemunafikan menodai juga banyak kerudung kepala dan jubah mereka. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa departemen agama, di antara banyak departemen di Indonesia, juga tidak bersih dari korupsi. Banyak alasan suci dapat dijadikan legitimasi untuk korupsi. Melakukan "mark-up" harga dan memungut "uang komisi" dalam berbagai proyek pemerintah maupun swasta, termasuk swasta keagamaan, rupanya sudah menjadi kebiasaan yang sulit diberantas. Meluasnya praktek korupsi di negara kita secara keseluruhan dan kesulitan untuk memberantasnya sebenarnya tidak lepas dari meluas dan berurat berakarnya kebohongan publik. Transparensi anggaran dan akuntabilitas penanggung jawab publik yang banyak didengung-dengungkan dalam rangka mengupayakan terciptanya sistem tata-kelola yang baik (*good corporate governance*) di berbagai lembaga, baik pemerintahan dan bisnis, bahkan dalam lembaga pendidikan, dalam kenyataan amat sulit diwujudkan. Apalagi dalam iklim

budaya yang terbiasa dengan ramai-ramai menyelenggarakan seminar atau pun "talk-show"—di mana "banyak yang dibicarakan, tetapi tidak ada yang dikerjakan"—kalau sesuatu sudah ramai dibicarakan orang, itu berarti sudah dikerjakan.

Mengingat begitu banyaknya kebohongan dalam berbagai aspek kehidupan kita, apalagi kadang kebohongan juga dilakukan atas nama kebenaran, masih ada artinyakah bicara tentang kesetiaan pada kebenaran? Benarkah Filsafat sebagai ilmu Kritis dapat menyumbang suatu yang berarti dalam upaya untuk itu? Jangan-jangan pembicaraan saya kali ini juga tidak lebih dari ikut menebar angin busuk kebohongan baru yang dibalut dengan toga akademik. Kalau itu angin busuk, balutan toga akademik pun, apalagi kalau dikibas-kibaskan dengan penuh kepongahan, pasti polutif bagi udara yang kita hirup bersama. Mari kita lihat saja. Kalau ada kekeliruan dalam apa yang akan saya katakan, itu bukan karena saya mau membohongi publik yang hadir di sini, tetapi melulu karena keterbatasan pengetahuan saya. Manusia adalah makhluk yang dapat keliru, dan saya ini manusia, maka saya, sudah barang tentu, dapat keliru. Apa yang saya duga benar, bahkan apa yang saya yakini benar sekalipun, secara objektif dapat salah. Tetapi, seperti masih akan lebih jelas dari uraian saya kemudian, filsafat sebagai ilmu kritis justru menyadarkan kita bahwa kesetiaan pada kebenaran mengandaikan kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa ada kemungkinan pendapat dan pengetahuan kita keliru. Kita juga tidak perlu memungkirkan bahwa dalam berbagai kesempatan, sengaja atau tidak, kita juga telah berbuat yang tidak benar.

Agar pembicaraan saya lebih terarah, saya akan membaginya dalam tiga bagian. Dalam bagian pertama saya akan menjelaskan pengertian kebenaran yang saya maksudkan dan pentingnya kebenaran tersebut bagi hidup kita sebagai manusia. Penjelasan ini saya

anggap perlu untuk saya kemukakan terlebih dulu karena dapat memberi alasan yang memotivasi mengapa kita perlu setia pada kebenaran. Kemudian dalam bagian kedua saya akan menguraikan apa yang saya maksudkan dengan Filsafat Sebagai Ilmu Kritis serta apa yang dapat disumbangkan olehnya bagi upaya kita untuk tetap setia pada kebenaran. Akhirnya dalam bagian ketiga saya akan mencoba mengusulkan beberapa gagasan tentang bagaimana kegiatan pendidikan dalam keluarga dan sekolah dapat memupuk kesetiaan pada kebenaran. Ketiga bagian tersebut sedikit banyak juga mencerminkan minat saya dalam menggeluti ilmu filsafat, yakni etika (filsafat moral), epistemologi (filsafat pengetahuan) dan filsafat pendidikan.

1. Pengertian dan pentingnya kebenaran

a. Pengertian

Apa itu kebenaran memang sulit didefinisikan secara memuaskan. Apalagi dalam ilmu filsafat rasanya tidak ada rumusan apa pun yang tidak dapat dipermasalahkan, dan perdebatan tentang masalah kebenaran dapat dikatakan telah berlangsung sepanjang sejarah filsafat dari awal mula sampai sekarang.

Namun supaya pembicaraan saya tidak sudah terjegal sejak awal dengan perdebatan soal pemakaian kata "kebenaran" ada baiknya saya sampaikan saja apa yang saya maksudkan dengan kata tersebut dalam judul yang saya pilih untuk pidato ini.

Seperti dalam pemakaian sehari-hari, saya memaksudkan "kebenaran" sebagai "kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, percayai dan nyatakan (baik secara lisan maupun tertulis) dengan kenyataan atau apa yang sesungguhnya terjadi."¹ Dalam hal hubungan antara kata dan laku atau pernyataan dan tindakan,

kebenaran berarti kejujuran dan ketulusan. Ada kesesuaian atau konsistensi antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Kata-kata kita dapat dipegang, dan bukan "ésuk delé soré tempé" alias "méncla-ménclé".

Dengan "kenyataan" saya maksudkan bukan hanya terbatas pada apa yang adanya secara ilmiah dapat dibuktikan, tetapi juga kenyataan yang secara intelektual dapat kita fahami dan secara rasional dapat diafirmasikan. Kenyataan yang terkait dengan kebenaran moral, kebenaran religius, kebenaran dalam seni dan sastra itu ada, kendati adanya kenyataan tersebut, dan dengan demikian juga kebenaran pernyataan tentangnya, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau diamati secara inderawi. Bahkan kenyataan yang penuh misteri dan tidak habis terselami pun termasuk kenyataan yang ada. Dalam kaitan dengan kenyataan yang penuh misteri ini, seperti dikemukakan oleh M. Heidegger,² kebenaran pertama-tama dimengerti bukan sebagai relasi kesesuaian antara pikiran dan kenyataan, tetapi sebagai ketersingkapan Ada (*aletheia/unconcealment*). Ketersingkapan macam itu sekaligus memuat unsur ketersembunyian (*lethe/concealment*). "Kenyataan atau apa yang sesungguhnya terjadi" juga tidak saya maksudkan sebagai suatu yang ada "di luar sana" yang sama sekali lepas dari kegiatan kita mengalami, menyadari, mengetahui dan mengungkapkannya; baik secara lisan maupun tertulis, secara verbal maupun pictorial, secara literal maupun metaforis-analogis. Dengan kata lain, "kenyataan atau apa yang sesungguhnya terjadi" tidak dapat kita fahami sama sekali lepas dari sistem simbol yang kita pakai untuk mengungkapkannya, tetapi sistem simbol yang kita pakai itu juga tidak mengadakan kenyataan tersebut.³

Dengan kata "kesesuaian" tidak saya maksudkan adanya korespondensi isomorfis atau hubungan langsung dalam bentuk satu lawan satu antara isi pikiran atau struktur logis bahasa dalam proposisi yang kita nyatakan dan struktur kenyataan "di luar sana" sebagaimana dimengerti dalam "teori gambar" Wittgenstein awal⁴ ataupun dalam atomisme logis B. Russell.⁵ Tetapi saya juga tidak akan membuang sama sekali teori kebenaran korespondensi sebagaimana dibuat oleh R. Rorty⁶ misalnya. Saya setuju dengan Rorty bahwa teori kebenaran korespondensi, kalau dimengerti sebagai adanya korespondensi antara proposisi sebagai entitas linguistik dengan fakta fisik "di luar sana" yang bukan entitas linguistik dan yang dapat kita akses lepas sama sekali dari pikiran dan pengalaman kita, memang suatu faham yang tidak memadai, karena melupakan peran aktif subjek penahu dan sentralitas bahasa dalam kegiatan manusia mengetahui. Juga faham fondasionalisme naïf dan teori pengetahuan representasionalisme yang memahami kegiatan mengetahui sebagai kegiatan merepresentasikan atau mencerminkan secara akurat kenyataan fisik "di luar sana" merupakan suatu faham yang tidak memadai. Tetapi lalu dari situ menyimpulkan untuk menyamakan begitu saja apa yang senyatanya benar dengan apa yang secara pragmatis berdasarkan kesepakatan (bahkan kesepakatan para ahli bidang yang bersangkutan sebagaimana dipahami dalam teori kebenaran konsensus model Thomas Kuhn)⁷ dalam praksis sosial bersama dianggap benar, sebagaimana dikemukakan oleh Rorty,⁸ merupakan faham yang juga tidak memadai. Mengapa demikian, masih akan saya jelaskan lebih lanjut dalam membahas sumbangan filsafat sebagai ilmu kritis dalam memupuk kesetiaan pada kebenaran.

Mengenai jenis kebenaran, menyangkut apa yang dicirikan olehnya, biasa dibedakan adanya tiga jenis. Kebenaran dapat menyangkut barang atau hal, menyangkut pribadi orang dan menyangkut pernyataan (pendapat, kepercayaan, pengetahuan). Kebenaran menyangkut barang atau hal, misalnya dibedakan antara emas murni dan emas imitasi, ijazah yang asli dan ijazah palsu. Jenis kebenaran yang pertama ini sering juga disebut kebenaran ontologis dan amat ditekankan oleh Plato. Kebenaran menyangkut pribadi orang, misalnya dibedakan antara sahabat yang benar/sejati dan sahabat palsu, antara pasangan hidup yang sebenarnya (isteri/suami yang sah) dan pasangan hidup selingkuhan. Orang yang benar adalah orang yang jujur atau tulus. Lawannya adalah orang yang culas. Dalam konteks hidup beragama dan bermoral, orang yang benar adalah orang yang beriman dan berperilaku baik. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama merupakan dua sisi dari satu keping mata uang. Tidak dapat dipisahkan. Seperti pernah dikemukakan oleh 'Wilfred Cantwell Smith', tempat sentral untuk memahami kebenaran dalam konteks hidup beragama dan hidup bermoral adalah kebenaran tentang pribadi orang. Ia bahkan mempertanyakan apakah hilangnya kepekaan terhadap kualitas personal kebenaran yang terjadi belakangan ini bukannya suatu penyakit serius yang didap manusia Barat modern. Salah satu akibatnya yang mencemaskan adalah terjadinya pemisahan antara kebenaran dan moralitas.¹⁰ Manakala suatu masyarakat telah melepaskan penentuan benar-salahnya suatu pernyataan dari konteks keterlibatan manusiawi dan moral orang yang membuat pernyataan tersebut, maka masyarakat tersebut telah kehilangan suatu yang amat berarti bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.¹¹

Kebenaran menyangkut pernyataan merupakan jenis kebenaran yang sejak Aristoteles amat dominan dalam wacana tentang kebenaran sampai dewasa ini. Tempat kedudukan kebenaran ada dalam penegasan putusan (*the act of judgment*) apakah sesuatu itu memang *p* atau *¬p*. Misalnya proposisi dalam bentuk pernyataan "Pada musim hujan Jakarta sering banjir" merupakan pernyataan yang dinilai benar karena ada kesesuaian antara isi pernyataan tersebut dengan kenyataan yang ada atau sungguh terjadi. Sedangkan pernyataan "Pada musim hujan pun Jakarta tidak pernah banjir" merupakan pernyataan yang salah karena tidak ada kesesuaian antara isi pernyataan tersebut dengan kenyataan yang ada atau sungguh terjadi. Kebenaran ilmiah atau kebenaran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, pada dasarnya termasuk jenis kebenaran pernyataan. Mengenai kebenaran pernyataan ini, melanjutkan pemikiran David Hume yang membedakan dua objek pemikiran manusia, yakni "hubungan antara gagasan-gagasan" (*relation of ideas*) dan "hal-hal yang bersifat faktual" (*matters of fact*),¹² kaum Positivis Logis¹³ membedakan antara kebenaran nalar (*truth of reason*) (yang bersifat *a priori* dan niscaya) dan kebenaran faktual (*truth of fact*) yang bersifat nisbi dan mentak (*probable*). Mereka menarik garis demarkasi antara pernyataan yang ilmiah dan yang tidak ilmiah sebagai pernyataan yang bermakna dan tidak bermakna berdasarkan apakah pernyataan tersebut dapat ditegaskan benar-salahnya secara ilmiah berdasarkan dua kategori tersebut. Maka mereka menganggap pernyataan metafisis, religius, etis dan estetis sebagai pernyataan yang bukan hanya tidak ilmiah tetapi juga yang tidak bermakna karena tidak dapat ditegaskan benar-salahnya. Pemikiran ini memang kemudian dikritik sebagai tidak memadai dan didasari oleh ideologi po-

sitivisme, tetapi pandangan bahwa kebenaran itu tidak lebih dari sekedar ciri dan fungsi suatu proposisi linguistik masih terus berlanjut sampai sekarang. Ini berarti bahwa dalam perjalanan waktu kebenaran pernyataan (= kebenaran teoretis) semakin mendominasi wacana tentang kebenaran. Konsep kebenaran ontologis dan kebenaran dalam tindakan (=kebenaran praktis) semakin dilupakan. Kegiatan mengetahui semakin dipisahkan dari kegiatan hidup itu sendiri, pengetahuan dipisahkan dari kenyataan. Pengetahuan sendiri kemudian dipahami melulu sebagai piranti (*instrument*) untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam hidup sehari-hari (*how to cope with reality*) dan tidak lagi ada unsur merujuk pada kenyataan. Sains adalah salah satu dari sekian narasi tentang kenyataan, dan kenyataan juga melulu dilihat sebagai apa yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya oleh sistem simbol yang diciptakan oleh manusia.

Rangkuman

Setelah mendengarkan uraian cukup panjang, sebuah rangkuman butir gagasan pokok yang ingin saya sampaikan kiranya diperlukan guna membantu mengingat.

1. Kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, percayai dan nyatakan dengan kenyataan atau apa yang sesungguhnya terjadi. Setia pada kebenaran berarti setia pada kenyataan sebagaimana adanya. Kenyataan sebagaimana adanya memang tidak pernah menyatakan diri begitu saja tanpa aktivitas manusia untuk menyingkapkannya. Tetapi kegiatan manusia untuk menyingkapkan dan memahaminya, kalau mau setia pada kebenaran, tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan melulu didorong oleh kepentingan untuk mengendalikan dan menguasai kenyataan tersebut. Paham realisme dan teori kebenaran korespondensi, sejauh tidak dipahami secara naif tetapi secara kritis, masih dapat dipertahankan seraya dipadukan dengan paham konstruktivisme dan teori kebenaran koherensi maupun pragmatik.
2. Kendati diskursus tentang kebenaran sepanjang sejarah filsafat tidak lepas dari pelbagai carut marut, dan konsep kebenaran objektif-universal dalam kenyataan tidak bebas dari kepentingan kehendak untuk berkuasa, mengatur dan mengendalikan, bahkan dipakai untuk menindas yang dinilai salah, namun kita tidak dapat membuang begitu saja konsep kebenaran dari kamus kehidupan kita. Konsep objektivitas dan universalitas kebenaran pengetahuan memang perlu dirumuskan ulang secara lebih memadai, sehingga peran subjektivitas, sifat relativitas dan partikularitas pengetahuan tidak diabaikan.

3. Secara moral dalam konteks sosial politik, pentingnya kebenaran dewasa ini menjadi nyata dalam menguatnya desakan untuk dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/ Perdamaian/ Persahabatan yang diberi otoritas untuk menyingkapkan kebenaran tentang telah terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia pada masa lalu. Kendati hasil kerja Komisi memang tidak selalu berhasil menyingkapkan kebenaran sebagaimana adanya, apalagi mendapatkan pengakuan yang sungguh jujur dari pihak yang bersalah, tetapi dalam upaya seoptimal mungkin untuk melakukan penyelidikan dengan mendengarkan secara adil pelbagai suara pihak yang terlibat, penilaian yang kurang lebih objektif tentang peristiwa yang telah terjadi dapat diambil. Komisi Kebenaran dibentuk dengan pengandaian bahwa kebenaran itu penting untuk diungkap dan berguna bagi prospek ke depan kehidupan demokrasi dalam negara yang sebelumnya dikuasai oleh rezim yang otoriter dan sarat tindak kekerasan. Kebenaran menjadi semacam garis vektor bagi adanya konsensus moral tentang pengakuan adanya kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu (*negative recognition*), dan rekonsiliasi yang dihasilkan dari penyingkapan masa lalu yang kelabu tersebut dapat menjadi perekat bagi masa depan yang secara sosial tersatukan dan secara moral lebih kokoh. Hal itu merupakan suatu bentuk perwujudan keadilan transisional.
4. Sumbangan filsafat sebagai ilmu kritis dalam memupuk kesetiaan pada kebenaran dapat diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, dalam perspektif moral sosial, dengan melakukan kritik ideologi; menguk tabir mitos-mitos kebohongan publik yang dipakai pihak yang berkuasa (baik secara politis, ekonomis, maupun budaya) untuk membenarkan kebijakan dan tindakannya yang

menugikan rakyat banyak. Kedua, dalam perspektif epistemologi sosial, dengan memeriksa secara kritis klaim-klaim kebenaran pengetahuan dan aliran-aliran pemikiran yang telah menyebabkan meluasnya sikap skeptis, bahkan sinis terhadap kebenaran. Terkait dengan ini juga memeriksa secara kritis apakah memang benar bahwa paham relativisme lebih tepat dianut guna menghindari konflik dalam masyarakat yang majemuk dan guna memupuk sikap toleran terhadap perbedaan.

5. Mendidik generasi muda untuk tetap setia pada kebenaran di tengah banyaknya kebohongan publik, mentalitas koruptif dan keengganan belajar dari kesalahan masa lalu memang tidak mudah, tetapi wajib dilakukan. Keluarga dan sekolah tidak imun terhadap pengaruh dunia luar. Maka dalam melakukan pendidikan nilai kebenaran dan kejujuran, agar berhasil, diperlukan jaringan kerjasama keluarga, sekolah, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Mengenai bagaimana pendidikan nilai kebenaran dan kejujuran itu dapat dilakukan dalam keluarga dan di sekolah, beberapa usulan kongkret sudah kami utarakan.